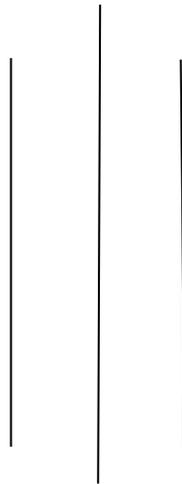




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA MENINJAU KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 22 - 24 JUNI 2023**



KOMISI V DPR-RI

JAKARTA, 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
I.1. Dasar Hukum	4
I.2. Maksud dan Tujuan.....	4
I.3. Lokasi dan Waktu.....	5
I.4. Agenda Kunjungan.....	5
II. HASIL PERTEMUAN DAN PENINJAUAN.....	5
II.1. Gambaran Umum.....	5
II.2. Hasil Pertemuan, Usulan dan Permasalahan	7
II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	9
III. PENUTUP.....	9
Foto Kegiatan.....	11



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA MENINJAU KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/
BASARNAS KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 22 – 24 JUNI 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

- 1) Keberadaan Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS Banjarmasin memiliki peran strategis untuk memberikan respons yang cepat, tepat, akurat dan terkoordinasi dalam upaya pencarian dan pertolongan baik dalam kecelakaan transportasi, bencana alam maupun keadaan yang membahayakan jiwa manusia, kepada seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.
- 2) Sesuai amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan, Pasal 4 menegaskan bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bertujuan antara lain untuk melakukan pencarian serta memberikan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; serta mencegah dan mengurangi kefatalan dalam kecelakaan, maka:
 - a) Masyarakat sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan seharusnya dapat meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya budaya Pencarian dan Pertolongan.
 - b) Kesiapsiagaan Badan Pencarian dan Pertolongan/Basarnas dalam melaksanakan upaya pencarian dan pertolongan sangat membantu masyarakat. Namun, kesiapsiagaan ini harus didukung dengan peralatan deteksi dini, telekomunikasi, dan sistem informasi beserta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, dibutuhkan pula kerjasama dari masyarakat dalam hal setiap orang yang mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia segera menyampaikan informasi yang benar kepada petugas.
 - c) Segera mewujudkan sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memenuhi standar nasional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas personel berupa pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan pertama Pasal 20, perubahan kedua Pasal 20 A, perubahan ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 16 Mei 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk:

- a. Melihat secara langsung fasilitas sarana dan prasarana, Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS;
- b. Mendengar secara langsung tugas, fungsi dan masukan berkenaan fasilitas sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

- butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*
- butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”

- butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Spesifik ke fasilitas sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 pada tanggal 22 – 24 Juni 2023, yang dipimpin oleh Ibu Dra. SRI RAHAYU (A-217/F-PDIP/Dapil JATIM VI).

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Pertemuan dengan pejabat BASARNAS disertai paparan/penjelasan singkat oleh pejabat BASARNAS terkait kegiatan layanan Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Peninjauan lapangan fasilitas sarana prasarana pendukung Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

II. HASIL PERTEMUAN DAN PENINJAUAN

II.1. Gambaran Umum



Wilayah kerja kantor pencarian dan pertolongan /BASARNAS Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan :

1. KANTOR SAR BANJARMASIN
2. POS SAR KOTA BARU
3. UNIT SIAGA SAR TABALONG
4. UNIT SIAGA SAR BATULICIN



- Sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain: 1 unit Rescue Truck, 1 unit Rescue Car, 3 unit Truck Personel, 1 unit Communication Mobile, 3 unit ATV, 1 unit Airboat dan 3 Unit Rescue Motorcycle.
- Jumlah personil Personil Kantor badan pencarian dan pertolongan/ SAR Banjarmasin adalah 37 orang yang terdiri dari:
 - Rescuer : 26
 - Penata Kelola SAR : 2
 - Analis SAR : 1
 - Operator Komunikasi : 2
 - Perawat : 2
 - Staf Administrasi : 4

II.2. Hasil Pertemuan, Usulan dan Permasalahan

Beberapa usulan dan permasalahan yang perlu diperhatikan pada diskusi di Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain:

1. Terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada kantor *Search and Rescue* (SAR) Banjarmasin sementara harus melaksanakan tugas di 5 unit kantor, dermaga, Pos SAR dan unit siaga SAR. Sehingga jumlah personil yang menempati 1 unit tersebut masih jauh dari standar/ideal pelaksanaan administrasi dan operasi SAR;
2. Kami mengapresiasi kinerja di Badan Pencarian Dan Pertolongan/BASARNAS yang cara kerjanya sangat efisien dan efektif untuk melakukan kegiatan SAR;
3. Badan Pencarian Dan Pertolongan/BASARNAS Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kerjasama dan kordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk pelibatan kegiatan SAR maupun pendidikan dan latihan;
4. Perlunya peningkatan kecepatan penanganan suatu peristiwa bencana (Quick Response) agar penanganan bencana bisa lebih cepat tertangani;
5. Kami menghimbau Badan Pencarian Dan Pertolongan/BASARNAS untuk membuat program perencanaan sarana prasarana yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah;
6. Dalam rangka peningkatan SDM di bidang SAR di Provinsi Kalimantan Selatan perlu di tingkatkan kegiatan pendidikan dan latihan (Diklat);
7. Terdapat keterbatasan terkait prasarana peralatan laut di beberapa Pos SAR di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta kondisi peralatan perlu dilakukan update berdasarkan kebutuhan setiap wilayah;
8. Perlu meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta serta komunitas dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung kesiapsiagaan pelaksanaan operasi SAR;
9. Perlu didorong unit-unit Pos SAR di kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan serta perlu dilakukan peningkatan unit siaga SAR Tabalong menjadi Pos SAR yang saat ini sedang dimulai pembangunan gedung unit siaga SAR Tabalong;

10. Pada tahun 2016 kantor badan pencarian dan pertolongan/BASARNAS Banjarmasin telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilandasan Ulin seluas 20.000 m², rencananya akan dibangun mess, prasarana pelatihan dan gudang peralatan SAR namun belum tersedia anggaran untuk pembangunan;
11. Terkait dengan ketersediaan SDM SAR yang berasal dari TNI/Militer yang melakukan fungsi dan tugas di struktur ASN Badan Pencarian Dan Pertolongan/BASARNAS, perlunya peninjauan terkait umur pension penugasan, karena SDM SAR dari kalangan TNI/militer harus pensiun mengikuti peraturan kemiliteran walaupun sudah ditugaskan di institusi sipil, yang mana sebaiknya umur pensiunnya disesuaikan dengan usia pensiun sipil/ASN yaitu penugasan akhirnya, khususnya di Badan Pencarian Dan Pertolongan/BASARNAS, selain itu SDM SAR yang berasal dari TNI/militer secara fungsi potensi berkarya di intitusi Badan Pencarian Dan Pertolongan/BASARNAS masih sangat dibutuhkan dan energik;
12. Terkait status beberapa staff di badan pencarian dan pertolongan/BASARNAS yang masih berstatus pegawai honor, kami menghimbau agar menjadi perhatian seluruh pihak.

II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain:

- 1) Komisi V memberikan apresiasi terhadap kinerja dan kesiapan *personel* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS dalam melaksanakan kegiatan SAR. Meskipun luas wilayah dan terbatasnya jumlah *personel*, menjadi kendala dalam penyelenggaraan upaya Pencarian dan Pertolongan (SAR) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Komisi V DPR RI mendukung BNPP/Basarnas untuk melakukan penambahan fasilitas sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan baik itu berupa Pos SAR di sejumlah wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Terkait penyesuaian waktu pensiun SDM SAR yang berasal dari Militer yang melakukan tugas dan fungsi di struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Badan Pencarian Dan Pertolongan/BASARNAS, Komisi V DPR RI akan mengagendakan RDP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) untuk membicarakan hal tersebut;
- 4) Komisi V DPR RI mendorong dan mendukung Badan Pencarian dan Pertolongan/Basarnas meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah serta kolaborasi bersama komunitas dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam rangka penyelenggaraan operasi SAR di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 5) Komisi V DPR RI akan memperjuangkan bersama badan pencarian dan pertolongan/Basarnas terhadap penambahan alokasi anggaran tahun 2024 guna meningkatkan penyelenggaraan operasi SAR dan pengembangan potensi SAR di wilayah Kalimantan Selatan secara khusus dan di Indonesia secara umum.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka pengawasan dan peninjauan Kantor Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS, Kota Banjarmasin, Provinsi

Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Juni 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan agar dapat ditindaklanjuti pemerintah (BASARNAS) untuk sarana prasarana dapat ditingkatkan sehingga pelayanan data cuaca maupun tanggap bencana dapat dimaksimalkan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Tim

ttd

Dra SRI RAHAYU
A-217

Foto Kegiatan

















